

PENGUATAN PENGELOLAAN RUMPON IJUK UNTUK PENGENDALIAN INFLASI KOMODITAS PERIKANAN DI KABUPATEN ACEH BARAT

**Hafinuddin^{1,9)}, Muhammad Rizal²⁾, Ismail Sulaiman^{1,9)}, Ikhsanul Khairi¹⁾,
Mursyidin³⁾, Roza Yusfiandayani^{4,10)}, Mohammad Iqbal Irfany⁵⁾,
Marhamah Muthohharoh⁵⁾, Afdhal Fuadi^{1,9)}, Samsul Bahri^{6,8,9)},
Iyan Al Misbah⁷⁾, Abdul Karim⁸⁾**

¹⁾Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

²⁾Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

³⁾Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh

⁴⁾Program Studi Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

⁵⁾Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

⁶⁾Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

⁷⁾Laboratorium Sistek dan Lingkungan Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

⁸⁾Laboratorium Laboratorium Biodiversitas dan Genetika Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

⁹⁾Pusat Studi Bawah Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

¹⁰⁾Tani dan Nelayan Center, IPB University

hafinuddin@utu.ac.id

Abstract

Capture fisheries are a marine industry commodity that is currently still dominated throughout the archipelago. Indonesia is one of the world's pelagic and demersal fisheries exporters. Aceh has a large capture fisheries potential that is capable of producing capture fisheries reaching 230 thousand tons per year. However, capture fisheries management in Aceh is still very low so capture fisheries production is generally only dominated by a few large fishermen. The implementation of activities to strengthen the management of palm fiber fish aggregating devices to control inflation of fishery commodities in West Aceh Regency is carried out with the following objectives: 1) Socialization of the program to multi-stakeholders; 2) Aligning perceptions and synchronizing programs related to multi-stakeholders; 3) Agreement of various related parties in the management of palm fiber fish aggregating devices; and 4) Formation of communal-based palm fiber fish aggregating device management regulations through the traditional sea institutions in West Aceh Regency. Activities were carried out at four different Lhok Panglima Laot locations including Lhok Meureubo, Lhok Padang Seurahet, Lhok Suak Seumaseh, and Lhok Bubon. The activities carried out include Pre-Kick Off Activities, Capacity Building Activities for Fishermen Recipients of the Program, FGD on Fish Aggregating Devices Management in Lhok Meureubo, FGD on Fish Aggregating Devices Management in Lhok Padang Seurahet, Lhok Bubon, and Lhok Suak Seumaseh, Drafting of Qanun on Communal Fish Aggregating Devices Management Based on Traditional Laot Institutions, FGD on Fish Aggregating Devices Management in West Aceh Regency, FGD on Palm Fiber Fish Aggregating Devices Management in West Aceh Regency: Synergy of Fish Aggregating Devices Qanun and Involvement of Various Capture Fisheries Stakeholders, High-Level Meeting (HLM) of the Regional Inflation Control Team (TPID) and the Regional Digitalization Acceleration and Expansion Team (TP2DD), Installation of Palm Fiber Fish Aggregating Devices in the Waters of Lhok Meureubo, Lhok Padang Seurahet, Lhok Suak Seumaseh, and Lhok Bubon. Based on the activities that have been carried out for fishermen, it can be concluded that strengthening and managing fishermen groups can be carried out systematically.

Keywords: West Aceh, Inflation, Capture fisheries, Palm fiber fish aggregating devices.

Abstrak

Perikanan tangkap menjadi komoditi industri laut yang saat ini masih didominasi di seluruh nusantara. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara eksportir perikanan pelagis dan demersal di dunia. Aceh memiliki potensi perikanan tangkap yang besar yang mampu memproduksi perikanan tangkap mencapai 230 ribu ton per tahunnya. Namun pengelolaan perikanan tangkap di Aceh masih sangat rendah sehingga produksi perikanan tangkap umumnya hanya didominasi oleh beberapa nelayan besar saja. Pelaksanaan kegiatan penguatan pengelolaan rumpon ijuk untuk pengendalian inflasi komoditas perikanan di Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan tujuan: 1) Sosialisasi program kepada multi stakeholders; 2) Menyelaraskan persepsi dan sinkronisasi program terkait dengan multi stakeholders; 3) Kesepakatan berbagai pihak terkait dalam pengelolaan rumpon ijuk; dan 4) Terbentuknya aturan pengelolaan rumpon ijuk berbasis komunal melalui lembaga adat laot di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan dilakukan pada empat lokasi Lhok Panglima Laot yang berbeda meliputi Lhok Meureubo, Lhok Padang Seurahet, Lhok Suak Seumasah dan Lhok Bubon. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Pra Kick Off, Kegiatan Capacity Building Untuk Nelayan Penerima Program, FGD Pengelolaan Rumpon Di Lhok Meureubo, FGD Pengelolaan Rumpon Di Lhok Padang Seurahet, Lhok Bubon, dan Lhok Suak Seumasah, Pembuatan Draft Qanun Pengelolaan Rumpon Secara Komunal Berbasis Lembaga Adat Laot, FGD Pengelolaan Rumpon Di Kabupaten Aceh Barat, FGD Pengelolaan Rumpon Ijuk Di Kabupaten Aceh Barat: Sinergi Qanun Rumpon Dan Keterlibatan Berbagai Stakeholders Perikanan Tangkap, High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemasangan Rumpon Ijuk Di Perairan Lhok Meureubo, Lhok Padang Seurahet, Lhok Suak Seumasah dan Lhok Bubon. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap nelayan. dapat disimpulkan bahwa penguatan dan pengelolaan kelompok nelayan dapat dilakukan secara sistematis.

Keywords: Aceh Barat, Inflasi, Perikanan tangkap, Rumpon ijuk.

PENDAHULUAN

Jumlah nelayan di Indonesia saat ini mencapai 1,27 juta orang. Namun, kondisi tersebut mengalami penurunan sebesar 5,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,34 juta orang (Muhdar, 2015). Pada tahun 2020, jumlah nelayan budidaya di Indonesia mencapai 2,23 juta orang, mengalami penurunan sebesar 10,44% dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta orang. Pada tahun 2021, Indonesia mencatat produksi perikanan tangkap sebesar 6,49 juta ton (Abidin, 2021). Hasil tangkapan ini terdiri dari berbagai jenis, termasuk ikan laut, perikanan perairan umum, dan perikanan daratan. Beberapa provinsi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan tangkap adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku. Meskipun produksi

perikanan tangkap berperan penting dalam perekonomian nelayan, hanya sekitar 22-29% dari total produksi perikanan tangkap nasional yang berhasil terserap oleh pasar (Amandra et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mengoptimalkan pemasaran dan distribusi hasil tangkapan nelayan. Selain itu, produksi perikanan tangkap juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, keberlanjutan, dan akses pasar. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan produksi dan efisiensi distribusi perlu terus diperhatikan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nelayan secara berkelanjutan.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh menyatakan bahwa produksi perikanan tangkap di provinsi ini mencapai 230 ribu ton per tahun. Meskipun jumlah ini sudah

signifikan, masih ada potensi ikan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya di perairan laut Aceh. Pada tahun 2023, nelayan di Aceh berhasil memproduksi perikanan tangkap sebanyak 8.634 ton, perikanan budidaya sebanyak 10,4 ton, dan produksi pengolahan hasil perikanan sebanyak 34 ton. Hasil tangkapan ini meliputi berbagai jenis ikan dan biota lainnya yang hidup di dasar, kolom, maupun permukaan perairan. Meskipun Aceh memiliki potensi yang besar, upaya terus diperlukan untuk memaksimalkan kapasitas nelayan dan mengoptimalkan produksi hasil tangkapan guna mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah ini. Inflasi di sektor perikanan tangkap di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kenaikan harga ikan tertentu. Salah satu jenis ikan yang menjadi penyumbang inflasi tinggi adalah ikan tongkol. Kenaikan harga ikan tongkol ini terutama terjadi di beberapa kota, seperti Kota Banda Aceh, Meulaboh, dan Lhokseumawe. Secara keseluruhan, inflasi di Aceh mencapai 0,53%, yang berada di atas rata-rata nasional bulanan sebesar 0,16%. Inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi (Sari, 2018). Upaya untuk mengendalikan harga ikan dan memastikan ketersediaan pasokan perlu terus diperhatikan agar inflasi tetap terkendali.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya sebuah upaya dalam menangani permasalahan kapasitas nelayan yang terdapat di Aceh Barat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni melalui implementasi peningkatan kapasitas nelayan dan produksi hasil tangkapan ikan pelagis dengan pendekatan teknologi rumpon ijuk berbasis lembaga adat laot. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

nelayan pesisir di Aceh Barat yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi reduksifitas inflasi perikanan pada wilayah tersebut.

Pelaksanaan kegiatan penguatan pengelolaan rumpon ijuk untuk pengendalian inflasi komoditas perikanan di Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan tujuan: 1) Sosialisasi program kepada *multi stakeholders*; 2) Menyelaraskan persepsi dan sinkronisasi program terkait dengan *multi stakeholders*; 3) Kesepakatan berbagai pihak terkait dalam pengelolaan rumpon ijuk; dan 4) Terbentuknya aturan pengelolaan rumpon ijuk berbasis komunal melalui lembaga adat laot di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan *outcome* (luaran) berupa harmonisasi program rumpon ijuk di Kabupaten Aceh Barat yang terlaksana secara terstruktur dan tersistematis.

METODE

Kegiatan dilakukan pada empat lokasi Lhok Panglima Laot yang berbeda meliputi Lhok Meureubo, Lhok Padang Seurahet, Lhok Suak Seumaseh dan Lhok Bubon. Teknis pelaksanaan kegiatan dimulai melalui pertemuan dalam bentuk 1) Rapat koordinasi; 2) *Focus Group Discussion* (FGD); 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan adat laot yang berkaitan dengan pengelolaan rumpon di Kabupaten Aceh Barat. FGD dilaksanakan berbasis masyarakat guna memperoleh informasi secara in situ dan akurat (Husni et al., 2021). Kegiatan yang melibatkan para peserta dan narasumber teknis diskusi diarahkan langsung oleh anggota panitia. Narasumber yang dihadirkan sejumlah tiga orang yang terdiri dari akademisi perguruan tinggi, praktisi dari dinas terkait dan aparaturnya penegak hukum. Setiap narasumber memaparkan

materi sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi guna mempersempit arah diskusi agar pelaksanaan kegiatan nantinya dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Pra Kick Off

Kegiatan pra kick off merupakan Rapat Koordinasi kegiatan dilakukan dengan menghadirkan berbagai pihak seperti Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, akademisi perguruan tinggi (Universitas Teuku Umar/ UTU, IPB University, dan Universitas Malikulsaleh), Tim TPID Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan. Kegiatan pra kick off dilaksanakan di Ruang Rapat Senat UTU pada tanggal 15 Agustus 2024. Kegiatan ini melahirkan beberapa rekomendasi seperti a). diperlukan kolaborasi multi pihak dalam penanganan inflasi komoditas perikanan di Kabupaten Aceh Barat; b). implementasi rumpon ijuk perlu melibatkan DKP Kabupaten Aceh Barat, PSDKP Lampulo, Polairud, Pos Lanal/TNI AL sebagai dinas teknis terkait dan aparat hukum untuk mendapatkan masukan lebih terarah dalam pelaksanaan kegiatan rumpon ijuk; c) implementasi rumpon ijuk akan dilakukan untuk kelompok usaha bersama (KUB) bidang penangkapan ikan dan KUB wajib menginternalisasikan nilai-nilai adat dalam berkelompok, serta melakukan koordinasi dalam pemanfaatan rumpon

ijuk bersama Lembaga Adat Panglima Laot di llok masing-masing.



Gambar 1: Dokumentasi kegiatan Pra Kick Off di Aula Universitas Teuku Umar

2. Kegiatan Capacity Building Untuk Nelayan Penerima Program

Peningkatan kapasitas untuk nelayan penerima program dilakukan dengan pendekatan diskusi dan pendampingan kelompok. Pendampingan dapat diartikan sebagai proses dalam membantu penguatan dalam mewujudkan kemandirian kepada para nelayan agar lebih produktif dan berkelanjutan (Sundari et al., 2021). Kegiatan dimulai dengan pemaparan yang dilakukan oleh pemateri dari IPB University tentang manajemen ekosistem bisnis desa nelayan berbasis kemitraan dan produk unggulan Kawasan pedesaan. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2024 di Aula Cut Nyak Dhien Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) kepada nelayan Kabupaten Aceh Barat yang disasar dalam program rumpon ijuk untuk pengendalian inflasi. Nelayan diharapkan memperkuat anggota kelompok dengan penyusunan rencana kegiatan KUB, pelatihan manajerial dalam pengelolaan KUB, dan memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak meliputi perguruan tinggi di sekitar tempat domisili KUB seperti UTU, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tengku Di Rundeng, Akademi Komunitas Negeri (AKN), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIMI) untuk

memperoleh *sharing knowledge* dan *sharing technology* sehingga KUB nelayan dapat mandiri dan maju. Selain itu, kemitraan dengan pihak pemerintah/dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat, PSDKP Lampulo Satwas Meulaboh, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD PPI), dan Syahbandar. Selanjutnya kemitraan juga dapat terjalin dengan pengusaha-pengusaha ikan baik di dalam Kabupaten Aceh Barat maupun di luar Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 2: Dokumentasi kegiatan *capacity building* kepada para nelayan penerima program

3. FGD Ke 1: Pengelolaan Rumpon Di Lhok Meureubo

Pelaksanaan FGD ke 1 yang mengangkat tema pengelolaan rumpon di Lhok Meureubo dihadiri oleh KUB Sepakat, KUB Nelayan Mandiri, dan KUB Jaya Bersama yang berjumlah 24 orang. Selain pihak KUB juga hadir para *Geuchik* (Kepala Desa) tempat KUB berdomisili yaitu *Geuchik Gampong* (Desa) Meureubo dan *Geuchik Gampong* Ujong Drien. Untuk memperkuat pengelolaan rumpon di Lhok maka juga dihadiri Lembaga Adat Laot Lhok yaitu Panglima Laot Lhok Meureubo. Adapun narasumber FGD ke 1 ini adalah akademisi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UTU. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2024 yang bertempat di Aula Kantor *Geuchik Gampong* Ujong Drien ini menghasilkan rekomendasi: 1) setiap

KUB diharapkan memiliki SOP dalam perawatan rumpon ijuk; 2) Qanun pengelolaan rumpon sangat diperlukan dan perlu disosialisasikan kepada nelayan di lhok setempat maupun di lhok yang berdekatan agar mengetahui peraturan adat dalam pengelolaan rumpon; 3) diperlukan ketegasan bagi pihak aparaturnya penegak hukum dan dinas terkait dalam menertibkan alat tangkap yang bersifat *destructive fishing* seperti *trawl* agar rumpon memiliki umur teknis mencapai 2-3 tahun; dan 4) lokasi peletakan rumpon ijuk yang sesuai menurut peraturan yang berlaku dan aman dari aktivitas alat tangkap *trawl*.



Gambar 3: Dokumentasi kegiatan FGD pengelolaan rumpon Lhok Meureubo

4. FGD Ke 2: Pengelolaan Rumpon Di Lhok Padang Seurahet, Lhok Bubon, Dan Lhok Suak Seumaseh

FGD ke 2 dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 di Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat. Peserta kegiatan ini mencapai 24 orang yang terdiri atas KUB Ramet Lueng Nak Yee, KUB Aneuk Laot, Panglima Laot Lhok Padang Seurahet, Panglima Laot Lhok Bubon, Panglima Laot Lhok Suak Seumaseh, *Geuchik Gampong* Padang Seurahet, *Geuchik Gampong* Bubon, *Geuchik Gampong* Suak Seumaseh. Kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari akademisi yang berasal dari FPIK UTU dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikusaleh (FISIP-Unimal). Hasil FGD ke 2 ini adalah 1) lokasi peletakan

rumpon ijuk yang sesuai menurut peraturan yang berlaku dan aman dari aktivitas alat tangkap *trawl*; 2) penguatan KUB dengan penyediaan fasilitas pengolahan hasil perikanan; 3) pemberdayaan istri/ wanita nelayan sebagai penyokong ekonomi rumah tangga perikanan (RTP); 4) peningkatan kapasitas anggota dalam mengelola KUB sehingga dapat mandiri dan menguntungkan untuk anggota kelompok dengan pendampingan dari perguruan tinggi dan atau dinas terkait; 5) Penegakan hukum terhadap penggunaan penggunaan alat tangkap *trawl* agar rumpon dapat berfungsi optimal.



Gambar 4: Dokumentasi kegiatan FGD pengelolaan rumpon Lhok Padang Seurahet, Lhok Bubon, dan Lhok Suak Seumaseh

5. Pembuatan Draft Qanun Pengelolaan Rumpon Secara Komunal Berbasis Lembaga Adat Laot

Hasil kegiatan FGD 1 dan FGD 2 ditindaklanjuti dengan merancang draft qanun pengelolaan rumpon di Kabupaten Aceh Barat. Draft qanun ini disusun bersama panglima Laot, KUB dan akademisi perguruan tinggi (UTU, Unimal, dan IPB University). Draft qanun disusun untuk 4 (empat) lembaga adat laot lhok yaitu Lembaga Adat Laot Lhok Meureubo di Kecamatan Meureubo, Lembaga Adat Laot Lhok Padang Seurahet di Kecamatan Johan Pahlawan, Lembaga Adat Laot Lhok Bubon dan Lembaga Adat Laot Lhok Suak Seumaseh yang keduanya berada dalam Kecamatan Samatiga. Draft qanun berisi tentang 1) lokasi pemasangan rumpon yang dalam wilayah pengelolaan lembaga adat lhok;

2) alat penangkapan ikan (API) yang dibolehkan untuk dioperasikan di sekitar rumpon; 3) metode perawatan rumpon; 4) sistem bagi hasil dari penangkapan ikan di sekitar rumpon; 5) sanksi adat bagi yang melanggar aturan qanun pengelolaan rumpon.



Gambar 5: Dokumentasi kegiatan FGD pembuatan draft qanun pengelolaan rumpon secara komunal berbasis lembaga adat laot

6. FGD Ke 3: Pengelolaan Rumpon Di Kabupaten Aceh Barat

Pelaksanaan FGD ke III ini bertujuan untuk mendapatkan isu strategis dalam pengelolaan rumpon di Kabupaten Aceh Barat. Narasumber yang hadir adalah Kepala Satuan Pengawas PSDKP Lampulo, Sekretaris DKP Aceh Barat, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Aceh Barat, dan Akademisi FPIK UTU. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 13 September 2024 di Aula DKP Kabupaten Aceh Barat menghadirkan *multistakeholders* di antaranya Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat, Kepala Satuan POLAIRUD Kabupaten Aceh Barat, Komandan Pos Angkatan Laut Kabupaten Aceh Barat, Komandan Rayon Militer 07/ Johan Pahlawan, Perwakilan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut GMDSS SROP Kelas IV Meulaboh Distrik Navigasi Kelas II Sabang, Panglima Laot Lhok Meureubo, Panglima Laot Lhok Padang Seurahet, Panglima Laot Lhok Kuala Bubon, Panglima Laot Lhok Bubon, Panglima Laot Lhok Suak Seumaseh dan KUB Nelayan penerima program rumpon ijuk (KUB Nelayan Mandiri, KUB Sepakat, KUB Jaya

Bersama, KUB Aneuk Laot dan KUB Nelayan Ramet Lung Nak Yee). Kegiatan ini memberikan rekomendasi meliputi 1) pembuatan pakta integritas sebagai bentuk komitmen implementasi regulasi pemanfaatan rumpon ijuk dengan stakeholders terkait; 2) Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya SROP Kelas IV Meulaboh, untuk menetapkan titik koordinat peletakan rumpon ijuk yang tidak berbenturan dengan jalur pelayaran yang telah ditetapkan, guna menjamin keselamatan dan keberlanjutan pemanfaatan rumpon; dan 3) sosialisasi terhadap lokasi peletakan dan peraturan rumpon ijuk bantuan yang telah diberikan kepada pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 6: Dokumentasi kegiatan FGD pengelolaan rumpon di kabupaten Aceh Barat

7. FGD 4: Pengelolaan Rumpon Ijuk Di Kabupaten Aceh Barat: Sinergi Qanun Rumpon Dan Keterlibatan Berbagai Stakeholders Perikanan Tangkap

Menindaklanjuti hasil FGD ke 3 mengenai sosialisasi tata cara penggunaan rumpon ijuk, maka diperlukan pelaksanaan FGD ke 4 yang bertujuan untuk mendorong penerapan kearifan lokal, meningkatkan kesadaran pelaku usaha perikanan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan Qanun yang telah disahkan oleh Lembaga Adat Laot Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan dilaksanakan di Aula Cut Nyak Dhien

Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) nelayan *trawl* mini berkomitmen untuk menghindari rumpon yang memiliki penanda (pelampung/ bendera tanda); 2) Perlu pendampingan dengan program yang terencana dan tepat sasaran dari DKP Aceh Barat terkait konversi alat tangkap *trawl* mini ke alat tangkap ramah lingkungan; 3) diperlukan koordinasi DKP Aceh Barat dengan pihak PSDKP meulaboh terkait aktifitas alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.



Gambar 7: Dokumentasi kegiatan FGD sinergi qanun rumpon dan keterlibatan berbagai stakeholders perikanan tangkap

8. High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

Dalam rangka menjaga realisasi inflasi akhir tahun di Kabupaten Aceh Barat tetap pada sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$, Bank Indonesia berkolaborasi dengan *stakeholders* daerah untuk menjaga kestabilan komoditas pangan salah satunya dengan implementasi teknologi rumpon ijuk. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dilaksanakan HLM TPID Aceh Barat dengan mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi melalui *Green Economy*: Implementasi Teknologi Rumpon Ijuk untuk Meningkatkan Produktivitas Sektor Perikanan Tangkap”. Kegiatan ini dilaksanakan 22 Oktober 2024 di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Kegiatan yang dihadiri oleh

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat, Rektor UTU, Kepala KPPN Meulaboh, Kepala BPS Aceh Barat, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Aceh Barat. Kepala KPw BI Provinsi Aceh (Rony Widijarto) menyampaikan peluncuran rumpon ijuk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian laut. Untuk mendukung keberhasilan program ini, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkaun harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif). Sekda Kabupaten Aceh Barat (Marhaban) menekankan sinergi yang kuat antara para pemimpin daerah sangat diperlukan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi tekanan inflasi pangan dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 8: Dokumentasi kegiatan *High Level Meeting (HLM)* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

9. Pemasangan Rumpon Ijuk Di Perairan Lhok Meureubo, Lhok Padang Seurahet, Lhok Suak Seumaseh dan Lhok Bubon

Tahapan selanjutnya adalah pemasangan rumpon ijuk di 11 lokasi yang telah disepakati bersama dengan penerima program. Lokasi rumpon ijuk yang dipasang berada perairan Aceh Barat dengan jarak dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh berkisar antara 5 sampai dengan 10 mil laut. Rumpon ijuk dipasang pada

kedalaman 20 sampai dengan 70 meter dan nelayan serta alat tangkap yang dibolehkan untuk melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar rumpon merupakan unit penangkapan ikan (UPI) yang telah dijelaskan di dalam Qanun pengelolaan rumpon.



Gambar 9: Proses pemasangan rumpon ijuk di perairan Lhok Meureubo, Lhok Padang Seurahet, Lhok Suak Seumaseh dan Lhok Bubon

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap nelayan, dapat disimpulkan bahwa penguatan dan pengelolaan kelompok nelayan dapat dilakukan secara sistematis. Pendampingan yang dilakukan secara bertahap secara tidak langsung akan memberikan pemahaman dan edukasi terhadap nelayan terkait teknis pengelolaan rumpon serta nilai-nilai tanggung jawab kelompok terhadap rasa memiliki dan menjaga aset yang telah diberikan. Dari bantuan rumpon yang telah diberikan, nelayan secara mandiri telah memberikan saran dan masukan terkait lokasi, teknis penanggulangan dan efektifitas pengelolaan yang berbasis adat setelah mengikuti tahapan pendampingan pengelolaan rumpon ijuk. Dengan demikian, hasil pelaksanaan kegiatan ini sangat merekomendasikan agar bantuan yang

diberikan kepada nelayan harus diikuti dengan kegiatan pendampingan melalui diskusi dan brainstorming, sehingga nelayan dapat teredukasi dan terbentuk rasa tanggungjawab dan memiliki terhadap aset rumpon yang diberikan sehingga menghasilkan ikan tangkapan dalam jumlah yang stabil dan berkelanjutan dengan nilai jual yang terkendali.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang telah mendanai program kegiatan penguatan pengelolaan rumpon ijuk untuk pengendalian inflasi komoditas perikanan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19: Analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117-138.
- Amandra, M. N., Widyastutik, W., & Zulfainarni, N. (2022). Determinan Nilai Tukar Nelayan Di Indonesia Dengan Pendekatan Geographically Weighted Panel Regression (GWPR). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 17(2), 195-210.
- Husni, S., Yusuf, M., Nursan, M., & FR, A. F. U. (2021). Pemberdayaan ekonomi nelayan rajungan melalui pengembangan teknologi alat tangkap bubu di

Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 347-355.

- Muhdar, H. M. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinan Indonesia: Masalah Dan Solusi. *Al-Buhuts*, 11(1), 42-66.
- Sari, D. A. (2018). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia: Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- Sundari, S., Suryani, S., Suwarni, P. E., Evadianti, Y., & Suharto, S. (2022). Pendampingan Nelayan Skip pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau yang Tepat di Bumi Waras Bandar Lampung. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 410-416.